

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tahun 2016 – 2020

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 62, SiLPA mencakup pelampauan penerimaan pendapatan (PAD, dana perimbangan atau pendapatan daerah yang sah), penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan. Selain itu, penyebab adanya sisa anggaran menurut Usman (2012) yaitu pendapatan yang *over estimate*, artinya terdapat realisasi pendapatan yang melebihi dari anggaran/target selama satu tahun anggaran. Adanya efisiensi belanja juga menjadi faktor penyebab SiLPA. Artinya dalam hal ini realisasi belanja tidak melebihi atau lebih kecil dari anggaran/target, sehingga mengakibatkan anggaran tidak terserap dengan baik. Untuk itu, peneliti menganalisis data temuan dan data olahan mengenai kinerja keuangan pendapatan dan belanja daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tahun 2016 – 2020.

1. Pendapatan Daerah

Dari analisis (varians) pendapatan daerah, secara umum kinerja pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar kurang baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya persentase pelampauan pendapatan daerah yang berada di bawah 100% yang artinya realisasi pendapatan tidak dapat melebihi target anggaran. Hal ini diperkuat dengan

teori Halim (2011), prinsip anggaran adalah target minimal yang harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan baik jika pendapatan yang diperoleh melebihi anggaran.

Persentase selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan pada tahun 2016 – 2018 berada di bawah 100% dengan persentase tahun 2016 sebesar 85,01%, tahun 2017 sebesar 90,92%, dan tahun 2018 sebesar 93,76%. Namun di tahun 2019 terjadi pelampauan pendapatan dengan persentase selisih antara anggaran dan realisasi pendapatan sebesar 108,46%. Sedangkan di tahun 2020 tidak terjadi pelampauan pendapatan, hal ini ditunjukkan dengan persentase sebesar 80,86%.

Dari komposisi pendapatan daerah terdapat Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pendapatan retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada tahun 2016 pendapatan retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak melampaui target dengan persentase masing-masing sebesar 93,02% dan 3,62%. Pada tahun 2017 tidak terjadi pula pelampauan target pendapatan retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan persentase masing-masing 98,63% dan 7,39%. Sedangkan di tahun 2018 terjadi pelampauan target pendapatan retribusi daerah yaitu sebesar 101,28% namun tidak terjadi pelampuan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan karena persentase hanya 3,62%. Berbeda halnya dengan tahun 2019 yang terjadi pelampauan target pendapatan retribusi daerah dan juga

terjadi pelampauan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu persentase masing-masing adalah 103,35% dan 170,09%. Tahun 2020 tidak terjadi pelampauan target pendapatan retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan persentase masing-masing 87,48% dan 0,00%.

Dalam periode penelitian yaitu tahun 2016 – 2020 pelampauan pendapatan secara keseluruhan hanya terjadi pada tahun 2019 yaitu pelampauan pendapatan daerah (secara keseluruhan) sebesar 108,46% dengan komposisi pelampauan pendapatan retribusi daerah sebesar 103,35% dan pelampauan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 170,09%. Selain itu, pelampauan pendapatan retribusi daerah terjadi pula di tahun 2018 dengan persentase sebesar 101,28% namun di tahun ini hanya terjadi pelampauan pada pendapatan retribusi daerah saja, secara keseluruhan pendapatan daerah di tahun 2018 tidak terlampaui dari target pendapatan. Di tahun 2016, 2017, dan 2020 baik pendapatan daerah (secara keseluruhan) maupun pendapatan retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak melebihi/melampaui target pendapatan tahun tersebut.

Dari hasil analisis diatas, secara keseluruhan tingkat efektivitas pendapatan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar terjadi di tahun 2019. Hal ini dibuktikan dengan rasio pelampauan pendapatan yang mencapai diatas 100%. Kemampuan dalam memperoleh

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikategorikan efektif jika rasionya mencapai 1 atau 100%.¹

2. Belanja Daerah

Dari analisis (varians) belanja daerah, secara umum kinerja pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tergolong efisien karena realisasi belanja tidak melebihi anggaran belanja. Menurut Halim (2011) jika realisasi belanja lebih kecil daripada anggaran belanja maka dinilai baik. Namun jika sebaliknya, maka mengindikasikan kurang baik. Kinerja pemerintah daerah akan dinilai baik jika mampu melakukan efisiensi belanja serta realisasi tidak melebihi anggaran. Terdapat teori lain yang menyatakan terkait kinerja pemerintah daerah yang baik yaitu pemerintah dapat melakukan efisiensi belanja dan realisasi belanja yang tidak melebihi target anggaran. Jika realisasi melebihi anggaran maka mengindikasikan kinerja belanja kurang baik.²

Selama tahun 2016 – 2020 terjadi efisiensi belanja daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Pada tahun 2016 efisiensi belanja mencapai 94,39%. Dengan rincian penyerapan anggaran untuk belanja operasi sebesar 96,36% dan penyerapan anggaran untuk belanja modal sebesar 92,73%. Nilai persentase efisiensi yang tinggi menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar telah memanfaatkan dana untuk memenuhi belanja daerah. Namun

¹ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: UUPSTIM YKPN, 2007), hlm. 129.

² *Ibid.*, 143.

hal ini masih menjadi penyebab SiLPA karena anggaran belanja belum terserap secara penuh.

Pada tahun 2017 efisiensi belanja sebesar 94,04%. Dengan rincian penyerapan anggaran untuk belanja operasi sebesar 96,06% dan penyerapan anggaran untuk belanja modal sebesar 89,48%. Dalam pemanfaatan anggaran tahun 2017, terjadi hal yang serupa dengan tahun sebelumnya yaitu masih terjadi sisa anggaran.

Tahun 2018 mengalami penurunan efisiensi belanja yaitu sebesar 85,34%. Dengan rincian penyerapan anggaran untuk belanja operasi sebesar 95,23% dan penyerapan anggaran untuk belanja modal sebesar 79,71%. Efisiensi ini terjadi karena adanya gagal lelang untuk pengadaan mesin sehingga dana tidak terserap untuk pembelian peralatan. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase efisiensi belanja modal yang mengalami penurunan 9,77% dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019 efisiensi belanja sebesar 87,14% dengan rincian penyerapan anggaran untuk belanja operasi sebesar 94,84% dan penyerapan anggaran untuk belanja modal sebesar 81,74%. Adanya efisiensi belanja daerah di tahun 2019 disebabkan karena adanya kesalahan dalam perencanaan anggaran. Terdapat anggaran belanja yang terlalu tinggi sehingga realisasi belanja tidak mampu menyesuaikan dengan anggaran belanja yang tinggi tersebut.

Analisis tahun 2020 menunjukkan terjadi peningkatan efisiensi belanja yaitu 91,57%. Dengan rincian penyerapan anggaran untuk belanja

operasi sebesar 98,06% dan penyerapan anggaran untuk belanja modal sebesar 79,93%. Adanya efisiensi belanja ini disebabkan karena kondisi pandemi *covid-19* yang mengakibatkan adanya beberapa kegiatan dilakukan secara virtual sehingga masih terdapat sebagian anggaran yang tidak terserap secara maksimal.

Dengan adanya efisiensi belanja tiap tahun tidak selalu berdampak positif yaitu menjadi suatu prestasi bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Adanya efisiensi belanja bisa menjadi penyebab terjadinya SiLPA pada suatu periode anggaran. Selain itu, efisiensi belanja juga mengindikasikan adanya penyerapan dana yang kurang maksimal untuk memenuhi belanja daerah. Untuk itu perlu adanya pengawasan ketat dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan anggaran.

B. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tahun 2016 – 2020

Dari hasil analisis perkembangan SiLPA tahun anggaran 2016 – 2020 menunjukkan bahwa setiap tahun masih terdapat SiLPA. Namun pada tahun 2018 dan 2019 SiLPA semakin besar. Itu artinya, dalam pelaksanaan anggaran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar belum memanfaatkan APBD secara maksimal khususnya dalam belanja daerah.

Dilihat dari perkembangan SiLPA, tahun 2016 terdapat SiLPA sebesar Rp 590.419.363. Dari hasil analisis penyebab SiLPA yaitu realisasi pendapatan daerah yang melebihi target anggaran pendapatan daerah (pelampauan

pendapatan) dan realisasi belanja daerah yang tidak melebihi anggaran belanja daerah (penghematan/efisiensi belanja) maka pada tahun 2016 SiLPA terjadi akibat adanya efisiensi belanja. Hal ini ditunjukkan dengan analisis selisih (varian) belanja sebesar 94,39% yang mengartikan bahwa realisasi belanja daerah yang tidak melebihi anggaran belanja daerah (penghematan/efisiensi belanja). Hal ini terjadi karena terdapat beberapa program yang tidak terlaksana di tahun 2016. Sehingga menimbulkan penyerapan anggaran yang tidak maksimal dan pada akhir periode anggaran terjadilah SiLPA. Namun demikian dari analisis pelampauan pendapatan di tahun 2016 tidak terjadi pelampauan pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan analisis selisih (varian) pendapatan sebesar 85,01%.

Hal yang serupa juga terjadi di tahun berikutnya yaitu 2017 dengan SiLPA sebesar Rp 312.055.275. Meskipun sudah mengalami penurunan SiLPA namun penyebab SiLPA masih sama dengan tahun 2016 yaitu adanya penghematan belanja daerah yang disebabkan karena tidak terlaksana program kegiatan di tahun 2017. Dari sisi analisis varian pendapatan sebesar 90,92% yang mengartikan bahwa realisasi pendapatan tidak melebihi target pendapatan (tidak terjadi pelampauan pendapatan).

Di tahun 2018 terjadi SiLPA yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp 3.199.166.275. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, SiLPA di tahun 2018 ini mengalami kenaikan. Hal tersebut terjadi karena adanya penghematan belanja daerah dengan persentase 85,34%. Efisiensi belanja ini disebabkan karena gagal lelang untuk pengadaan mesin. Hal ini ditunjukkan dengan rasio efisiensi belanja modal yang hanya terserap sebesar 79,71%. Namun demikian tidak terjadi

pelampauan pendapatan, hal ini ditunjukkan dengan rasio efisiensi pendapatan sebesar 93,76%.

Sedangkan pada tahun 2019 masih terjadi SiLPA yang tinggi bahkan besaran SiLPA melebihi tahun 2018. SiLPA di tahun 2019 adalah sebesar Rp 3.762.997.601. Penyebab SiLPA tahun 2019 yaitu adanya efisiensi belanja dan pelampauan pendapatan. Hal ini terlihat dari efisiensi belanja sebesar 87,14% dan pelampauan pendapatan sebesar 108,46%. Realisasi belanja daerah yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan anggaran belanja daerah ini dikarenakan pagu anggaran belanja daerah yang ditetapkan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 terjadi kesalahan dalam perencanaan anggaran belanja sehingga realisasi belanja tidak maksimal. Selain itu pelampauan pendapatan juga menjadi faktor penyebab SiLPA dengan komposisi pendapatan retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu persentase masing-masing yang cukup tinggi adalah 103,35% dan 170,09%.

Tahun 2020 masih terjadi SiLPA namun tidak cukup tinggi karena dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 SiLPA mengalami penurunan yang cukup drastis. Angka SiLPA di tahun 2020 ini sebesar Rp 390.697.083. Secara analisis pendapatan daerah, tidak terjadi pelampauan pendapatan daerah karena pelampuan pendapatan sebesar 80,86% sedangkan efisiensi belanja sebesar 91,57%. Adanya *covid-19* di tahun 2020 mempengaruhi adanya SiLPA. Dari segi pendapatan terjadi penurunan karena kebijakan pemerintah terkait *covid-19*, namun dari segi belanja juga terjadi efisiensi yaitu 91,57%. Artinya di tahun 2020

SiLPA terjadi akibat efisiensi belanja karena beberapa pelaksanaan kegiatan dilakukan secara virtual sehingga tidak menyerap begitu banyak belanja/pengeluaran.